

Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

Welia Sapitri^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: wellya270@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability of local government financial reports in the form of audit opinion by BPK and local government financial performance (independence ratio, activity ratio, and growth ratio) on the level of corruption of local governments in Indonesia. This study uses a sample of financial reports of Regency / City Regional Governments in Indonesia that have been audited by BPK in 2020 and the KPK Annual Report in 2020. Based on the purposive sampling method, the total research sample was 507 financial reports of all Regency / City Regional Governments in Indonesia. Hypothesis testing in this study used logistic regression techniques. This study shows that audit opinion, independence ratio, activity ratio, and growth ratio have no significant effect on the level of corruption in Indonesia.

Keywords: *Accountability; Corruption; Financial Performance; Influence.*

How to cite

Sapitri, W. & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(3), 339-352. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.58>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Proses reformasi yang berlangsung sekitar tahun 2000-an di Indonesia, memberikan angin segar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengelola keuangan daerah mereka sendiri. Berdasar pada Undang-Undang No. 25 tahun 1999, tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (digantikan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014) menjadi salah satu pedoman yang memperkuat wewenang pemerintah daerah menerapkan otonomi, sehingga mereka memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri sistem pemerintahan daerahnya masing-masing (Heriningsih, 2014).

Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan supaya pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi maupun akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan dan bisa menjadi sarana tercapainya suatu *good governance* (Mardiasmo,

2009). Namun, menurut Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) yang dikutip oleh Khairudin dan Rina Erlanda (2016), semenjak diberlakukannya otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2001, terdapat kecenderungan peningkatan kasus tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LSM *Indonesian Corruption Watch* (ICW), telah terjadi ribuan kasus tindak pidana korupsi selama 15 tahun terakhir, sejak tahun 2004-2019. Tindakan kasus korupsi yang terjadi, juga mengalami peningkatan dari tahun-ketahunnya ditingkat pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencatat sebanyak 114 [kepala daerah](#) terjerat kasus *rasuah* dari tahun 2004 hingga 2019. Dari 114 kepala daerah ini, sebanyak 98 orang atau sebanyak 88% disumbangkan oleh kepala daerah Kabupaten/Kota. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terbanyak diungkap terjadi pada tahun 2018.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, memberikan bukti yang lebih jelas mengenai kurangnya peran dari akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berdampak serius pada kemaslahatan bangsa dan negara (Norhadijah, 2022). Dalam peningkatan kualitas transparansi maupun akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan perlu menjalani audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam bentuk audit keuangan. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Dari hasil pemeriksaan keuangan ini nantinya akan disajikan opini berupa empat (4) kategori opini audit, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang menjadi dasar oleh peneliti untuk menilai tingkat keakuntabilisan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Semester I Tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan memberikan penyajian hasil terhadap laporan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan keuangan dilakukan pada 559 objek pemeriksaan, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) beserta LKBUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari 559 objek pemeriksaan tersebut, terdapat 508 pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang wajib menyusun LK Tahun 2020 dan BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 507 LKPD. Hasil dari pemeriksaan BPK terhadap 507 LKPD tersebut menghasilkan opini audit seperti dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Opini Audit BPK terhadap LKPD tahun 2020

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2020	453	89,3	48	9,5	2	0,4	4	0,8	507

Sumber: IHPS BPK RI, Data diolah Semester 1 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah (Wulandari, 2015). Namun, pada

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012), memperlihatkan bahwa penilaian terhadap akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Effendy (2013), juga ditemukan bahwa opini BPK ataupun hasil audit dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan, dikarenakan pentingnya pemeriksaan yang independen dan bebas dari bias. Namun, penelitian tersebut tidak ada yang secara langsung menghubungkannya dengan masalah korupsi. Dalam penelitian Heriningsih dan Marita (2013), menunjukkan bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah di Pulau Jawa juga memberikan kesimpulan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sarah (2014), pada penelitiannya ditemukan adanya hubungan antara opini BPK RI dengan tingkat korupsi ini.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja masa lalu dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dapat memperoleh gambaran posisi keuangan yang memperlihatkan kondisi aktual entitas dan bagaimana potensi kinerja di masa mendatang (Nugroho, 2012). Dalam penelitian ini, digunakan tiga rasio untuk melihat kinerja keuangan di pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2012), meneliti tentang pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini adalah penambahan variabel kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) sebagai variabel independen. Selain itu juga mengacu pada penelitian Aminah (2020) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. Yang membedakannya dengan penelitian ini juga pada variabel temuan audit dan tindak lanjut hasil audit yang diganti menjadi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Heriningsih dan Marita (2013), yang meneliti tentang pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Pulau Jawa. Yang membedakan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang meliputi pemerintah daerah di Indonesia.

Secara empiris, pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap korupsi di pemerintah daerah di Indonesia ini belum banyak diteliti. Penelitian ini juga meujuk penelitian yang dilakukan Sitorus dan rahayu (2018) yang meneliti tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi. Yang membedakannya adalah variabel transparansi yang diganti menjadi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan teori yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap korupsi, serta menambah referensi tentang peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan seberapa penting akuntabilitas terhadap LKPD dan menunjukkan bahwa semakin bagus atau buruk analisis rasio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap angka korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini berjudul Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi kasus pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini tergolong pada penelitian kausalitas. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan dugaan korupsi tahun 2020 yang didapat dari Laporan Tahunan KPK RI. Sampel pada penelitian ini adalah 507 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Data penelitian ini diambil dari laman resmi BPK (bpk.go.id), dan tingkat korupsi di pemerintah daerah diambil dari situs Laporan Tahunan KPK RI (kpk.go.id). Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisis data yaitu, Metode Dokumenter (Dokumentasi) dan Studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*) dengan bantuan SPSS Ver. 22

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi logistik (*logistic regression*). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (opini audit, kelemahan spi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio pertumbuhan) terhadap variabel dependen yaitu korupsi.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan pada 507 data observasi yang berasal dari jumlah seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia diperoleh data seperti tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OP	507	0	1	.89	.309
RK	507	.00	2.42	.1618	.19611
RBO	507	.51	.94	.7789	.06823
RBM	507	.05	.45	.1884	.06651
RT	507	-40.06	12.04	-6.2920	6.47340
KOR	507	0	1	.02	.125
Valid N (listwise)	507				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil analisis statistik deskriptif terhadap penerimaan opini audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,89 dan standar deviasi 0,309. Nilai rata-rata sebesar 0,89 menunjukkan bahwa pemda yang mendapat opini audit WTP dan WTP-DPP dengan kode 1 sebesar 453 pemda. Sedangkan sebanyak 54 pemda mendapat opini selain WTP dan WTP-DPP.
- Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap rasio kemandirian menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum

sebesar 2,42 yang diperoleh Kabupaten Badung (Provinsi Bali) (2020). Nilai rata-rata sebesar 0,1618 dan standar deviasi 0,19611. Nilai rata-rata sebesar 0,1618 menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian pemda kabupaten/kota adalah 16 persen atau kriteria kemampuan pemda sangat kurang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah

- c) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap rasio belanja operasi menunjukkan nilai minimum sebesar 0,51 yang diperoleh Kabupaten Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara) (2020), nilai maksimum sebesar 0,94 yang diperoleh Kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung) (2020). Nilai rata-rata sebesar 0,7789 dan standar deviasi 0,06823. Nilai rata-rata sebesar 0,7789 menunjukkan bahwa rata-rata rasio aktivitas belanja operasional pemda kabupaten/kota adalah 78 persen atau tingginya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional daerah.
- d) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap rasio belanja modal menunjukkan nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,45 yang diperoleh Kabupaten Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara) (2020). Nilai rata-rata sebesar 0,1884 dan standar deviasi 0,06651. Nilai rata-rata sebesar 0,1884 menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian adalah 19 persen atau persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.
- e) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap rasio pertumbuhan menunjukkan nilai minimum sebesar -40,06 yang diperoleh Kota Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) (2020), nilai maksimum sebesar 12.04 yang diperoleh Kabupaten Jayapura dengan rata-rata sebesar -6,2920 dan standar deviasi 6,47340 . Nilai rata-rata sebesar -6.2920 menunjukkan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan adalah 6 persen atau kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan keuangannya yang telah dicapai periode ini cenderung kecil.
- f) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap korupsi menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,02 dan standar deviasi 0,125. Nilai rata-rata sebesar 0,02 menunjukkan bahwa korupsi dengan kode 1 menunjukkan bahwa sampel penelitian tidak lebih banyak korupsi dari 507 sampel yang diteliti. Dari 507 pemda terdapat 8 pemda yang korupsi dan 499 pemda tidak korupsi.

Variabel rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan yang menggunakan skala pengukuran rasio memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut cukup baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya menunjukkan bahwa standar error dari variabel tersebut kecil. Sedangkan untuk variabel opini audit, dan korupsi menggunakan skala pengukuran nominal, nilai rata-rata dan standar deviasi tidak tepat digunakan sebagai alat analisis kualitas data, karena kode angka yang digunakan dalam skala pengukuran nominal hanya berfungsi sebagai label kategorial semata tanpa nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apa-apa (Ghozali, 2011:4).

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Karena variabel independen bersifat dummy (korupsi atau tidak korupsi), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011:261).

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

a. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Pengujian kesesuaian keseluruhan model (overall model fit) dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number=0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

Ho :Model yang dihipotesiskan fit dengan data

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Berdasarkan hipotesis ini, maka Ho harus diterima dan Ha harus ditolak agar model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input.

Tabel 4.4 adalah Iteration History 0 yang merupakan -2 Log Likelihood awal. Tabel ini akan dibandingkan dengan tabel 4.5 tabel Iteration History 1 yang merupakan -2 Log Likelihood akhir. Adanyaselisih antara -2 Log Likelihood awal dengan -2 Log Likelihood akhir menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) tidak dapat di tolak dan model fit dengan data.

Tabel 3
Iteration History

Iteration History^{a,b,c}		
Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
1	167.540	-1.937
2	99.356	-2.938
3	84.318	-3.661
4	82.327	-4.041
5	82.258	-4.129
6	82.258	-4.133
7	82.258	-4.133

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 82.258

c. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber:Output SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 22, pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai -2 Log Likelihood awal (tabel Iteration History 0) adalah sebesar 82.258. Secara matematis, angka tersebut signifikan pada alpha 5% dan berarti bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti hanya konstanta saja yang tidak fit dengan data (sebelum dimasukkan variabel bebas ke dalam model regresi) (Ghozali, 2011: 268).

Berdasarkan output tersebut, terjadi penurunan nilai antara -2 Log Likelihood awal dan akhir sebesar 9,155. Penurunan nilai -2 Log Likelihood ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R. Square)

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square. Nilai Cox & Snell R Square adalah sebesar 0,011 yang berarti bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 1,1%. Cox & Snell R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R² pada multiple regression sehingga sulit diinterpretasikan.

Kelemahan mendasar yang dimiliki adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka baik nilai R² maupun Cox & Snell R Square akan mengalami peningkatan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, Nagelkerke R Square digunakan dalam mengevaluasi mana model regresi yang terbaik karena nilai yang dihasilkan dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011).

Berdasarkan Tabel 4.6 dibawah ini, nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,119 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 11.9%, sedangkan sisanya sebesar 88.1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian seperti integritas manajemen (Chen, et al, 2012; Effendy, 2013), rasio keuangan Efektifitas (Sularso, et al, 2011; Fidelius, 2013; Dwijayanti, 2014), kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan implementasi SAP (Mahaputra, et al, 2014).

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	73.103 ^a	.018	.119

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Output SPSS

c. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi logistik biner. Menilai kelayakan dari model regresi dapat dilakukan dengan memperhatikan goodness of fit model yang diukur dengan Chi-Square pada kolom Hosmer and Lemeshow's (Ghozali, 2009: 269). Hipotesis yang digunakan untuk menilai kelayakan model regresi ini adalah:

Ho: Tidak ada perbedaan antara model dengan data

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data

Tabel 5
Menguji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	9.470	8	.304

Sumber: Output SPSS

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow's Test. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,304. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut di atas 0,05 yang berarti hipotesis 0 (Ho) tidak dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

d. Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas menggunakan metrik korelasi antara variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antara variabel bebas dalam penelitian.

Hasil Tabel 6 menunjukkan tidak ada nilai koefisien korelasi yang nilainya lebih besar dari 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebasnya (Ghazali, 2006:).

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation Matrix		Constant	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Step 1	Constant	1.000	-.037	-.011	-.994	-.922	.058
	X1	-.037	1.000	-.317	.013	-.031	-.160
	X2.1	-.011	-.317	1.000	-.003	.096	.401
	X2.2	-.994	.013	-.003	1.000	.885	-.032
	X2.3	-.922	-.031	.096	.885	1.000	-.001
	X2.4	.058	-.160	.401	-.032	-.001	1.000

Sumber: Output SPSS

e. Hasil Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan pemda korupsi.

Tabel 7
Matriks Klasifikasi

Observed		Predicted		Percentage Correct	
		Korupsi			
		Tidak Korupsi	Terjadi Korupsi		
Step 1	Korupsi	Tidak Korupsi	499	0	100.0
		Terjadi Korupsi	8	0	.0
Overall Percentage					98.4

a. The cut value is ,500
Sumber: Output SPSS

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan pemda korupsi adalah sebesar 98,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 0 pemda (0%) yang diprediksi akan korupsi dari total 8 pemda. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan pemda korupsi adalah 100%. Hal ini berarti bahwa dengan model regresi tersebut, terdapat sebanyak 499 pemda (100%) yang diprediksi tidak korupsi dari total 499 pemda yang tidak korupsi.

Hasil Uji Regresi Logistik

Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	X1	-2.356	.765	9.499	1	.112	.095
	X2.1	1.360	1.103	1.520	1	.218	3.897
	X2.2	2.142	12.239	.031	1	.861	8.512
	X2.3	2.723	12.145	.050	1	.823	15.223
	X2.4	-.006	.054	.012	1	.914	.994
	Constant	-4.885	11.661	.176	1	.675	.008

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4.
Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:

$$KOR = -4,885 - 2,356OP + 1.360RK + 2,142RBO + 2,723RBM - 0.006RT$$

Berdasarkan pengujian regresi logistik (*logistic regression*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan dalam tujuh bagian. Bagian pertama membahas Pengaruh opini audit (OP) terhadap tingkat korupsi (KORUP) (H1). Bagian kedua membahas pengaruh rasio kemandirian (RK) terhadap tingkat korupsi (KORUP) (H2). Bagian ketiga membahas rasio belanja operasional (RBO) terhadap tingkat korupsi (KORUP) (H3). Bagian keempat membahas rasio belanja modal (RBM) terhadap tingkat korupsi (KORUP) (H4). Bagian kelima membahas pengaruh rasio pertumbuhan (RT) terhadap tingkat korupsi (KORUP) (H5).

Pengaruh opini audit (OP) terhadap tingkat korupsi (KORUP)

Variabel OP menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -2,356 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,112, lebih besar dari $\alpha=5\%$. Karena tingkat signifikansi (α) lebih besar dari $\alpha=5\%$, maka hipotesis ke-1 tidak dapat diterima (ditolak). Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2012) dan Heriningsih (2013; 2014) dan berbanding dengan penelitian yang dilakukan Sarah (2014).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Apabila opini auditor WTP dan WTP-DPP maka tidak menjamin dan menunjukkan bahwa pemda tidak melakukan korupsi. Contohnya seperti di Kabupaten Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur) mendapat opini WTP-DPP dan terdapat kasus korupsi. Di kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat) dan kabuapen Muara Enim (Provinsi Sulawesi Selatan) (2013) mendapat opini WTP- DPP dan terdapat kasus korupsi. Di Kabupaten Banggai Laut (Provinsi Sulawesi Tengah) (2013) mendapat opini WTP dan terdapat kasus korupsi.

Pengaruh Rasio kemandirian (RK) terhadap tingkat korupsi (KORUP)

Variabel RK menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 1,360 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,218, lebih besar dari $\alpha=5\%$. Karena tingkat signifikansi (α) 0,218 lebih dari $\alpha=5\%$, maka Hipotesis ke-2 pada penelitian ini tidak dapat diterima (ditolak). Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriningsih (2013).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris jika rasio kemandirian suatu daerah bagus/tinggi maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan redistribusi daerah yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, namun tidak berartibahwa di pemda akan terjadi kasus tindak korupsi Contohnya di Kabupaten Kutai Timur (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Banggai Laut (Provinsi Sulawesi Tengah) di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki rasio kemandirian hanya mencapai 7% dan 4% (sangat rendah) menunjukkan kemampuan daerah sangat rendah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Akan tetapi daerah ini menjadi penyumbang kasus korupsi pemda pada tahun 2020 melebihi daerah-daerah yang nilai kemandiriannya lebih baik seperti Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Kota Tangerang (Provinsi Banten) yang mencapai persentase 157% dan 121% tingkat kemandirian daerahnya namun tidak terdapat korupsi oleh pemdanya ditahun 2020 tersebut.

Pengaruh Rasio Belanja Operasi (RBO) terhadap tingkat korupsi (KORUP)

Variabel RBO menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 2,142 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,861 lebih besar dari $\alpha= 5\%$. Karena tingkat signifikansi (α) RBO lebih besar dari $\alpha= 5\%$, maka hipotesis ke-3 tidak berhasil didukung (ditolak). Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa rasio aktivitas belanja operasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Heriningsih (2013). Contohnya pada Kabupaten Klungkung (Provinsi Bali) dan Jember (Provinsi Jawa Timur) yang masing-masing mencapai tingkat 90% dalam belanja Operasi namun tidak terdapat kasus korupsi pada pemerintah daerahnya dibanding dengan Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Banggai Laut (Provinsi Sulawesi Tengah) yang hanya mencapai 68% dan 72% untuk belanja operasi namun terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pemda di daerah tersebut.

Pengaruh Rasio Belanja Modal (RBM) terhadap tingkat korupsi (KORUP)

Variabel RBM menunjukkan koefisien positif sebesar 2,723 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,823, lebih besar dari $\alpha= 5\%$ Karena tingkat signifikansi (α) RBM lebih besar dari $\alpha= 5\%$, maka hipotesis ke-4 tidak didukung (ditolak). Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriningsih (2013).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa rasio aktivitas belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil yang berarti bahwa Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya masih kecil. Contohnya pada Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat) dan Kabupaten Kepulauan Morotai (Provinsi Maluku Utara) dengan rasio belanja modal masing-masing mencapai 45% yang berarti bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten tersebut memang masih digunakan untuk kebutuhan belanja modal dan tidak menjadi alasan kasus korupsi di pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio pertumbuhan (RT) terhadap tingkat korupsi (KORUP)

Variabel RT menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,006 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,914, lebih besar dari $\alpha= 5\%$. Karena tingkat signifikansi (α) lebih besar dari $\alpha= 5\%$, maka hipotesis ke-5 tidak berhasil didukung (ditolak). Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Heriningsih (2013). Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah pada tahun 2020 relatif rendah.

Penelitian ini membuktikan bahwa jika rasio pertumbuhan bagus maka terjadi peningkatan sumber-sumber pendapatan di daerah, namun tidak berarti bahwa pemda melakukan tindak korupsi. Contohnya pada Kabupaten Wondama dan Fakfak (Provinsi Papua Barat) yang mencapai rasio Pertumbuhan sebesar 151% dan 311% dan juga kabupaten Pania (Provinsi Papua) yang mencapai rasio 215% namun pemerintah daerah di daerah tersebut tidak melakukan tindak korupsi pada tahun 2020.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Secara empiris penelitian dengan pengaruh akuntabilitas LKPD dan kinerja keuangan pemda terhadap tingkat korupsi di Indonesia belum banyak diteliti. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan opini audit secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia selama tahun 2020 dan menyatakan H1 penelitian ini ditolak. *Kedua*, Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan rasio kemandirian secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi selama tahun 2020 dan menyatakan H2 penelitian ini ditolak. *Ketiga*, Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan rasio aktivitas belanja modal secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi selama tahun 2020 dan menyatakan H3 penelitian ini ditolak. *Keempat*, Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan rasio aktivitas belanja modal secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi selama tahun 2020 dan menyatakan H4 penelitian ini ditolak. *Kelima*, Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan rasio pertumbuhan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi selama tahun 2020 dan menyatakan H5 penelitian ini ditolak.

Keterbatasan

Penelitian mengenai tingkat korupsi di Indonesia ini memiliki beberapa keterbatasan dua hal berikut ini. *Pertama*, Periode waktu yang diteliti hanya untuk 1 tahun anggaran sehingga tidak bisa membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. *Kedua*, Data-data yang digunakan untuk penelitian kebanyakan masih bersifat rahasia dan sulit di akses sehingga harus langsung menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian mengenai tingkat korupsi di Indonesia di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran berikut ini. *Pertama*, Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan seluruh pemda yang ada di Indonesia baik kota, kabupaten, maupun provinsi sebagai populasi penelitian. *Kedua*, Menggunakan periode waktu penelitian yang lebih dari 1 tahun misalnya 3 atau 5 tahun untuk melihat perbandingan dan trend negatif yang ada. *Ketiga*, Menggunakan proksi lain untuk variabel ukuran pengukuran kinerja keuangan. *Keempat*, Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain baik itu keuangan dan non keuangan. *Kelima*, Pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak banyak menggunakan variabel dummy karena akan berpengaruh terhadap hasil uji.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi. “*Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*”. Skripsi Jurusan Ilmu ekonomi dan pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2013.
- Aminah, Wiwin. I “*Pengaruh Akuntabilitas, Temuah Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi*”. *Journal Accounting and Finance*, Vol. 4, No. 2. September 2020.

- Anwar, Azwar. "Peran Spi Terhadap Pencapaian Opini Wtp Dan Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Gug (Analisis Studi Pustaka)". Ikhtiyar, Volume 11 No. 1. Januari – Maret 2013.
- Bawono, Ick Rangga dan Yanuar E. Restianto. 2020. "Akuntabilitas dan Trnsparansi LKPD Berpengaruh terhadap kasus korupsi: benarkah?". Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol.4, No. 2. Hlm. 113-127
- Dwiyanto, A. "Patologi Birokrasi: Sebab dan Implikasinya bagi Kinerja Birokrasi Publik", dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Effendy, Yuzwar. "Tinjauan hubungan opini wtp bpk dengan kasus korupsi Pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan Pemerintah, hubungan antara masyarakat, Pemerintah dan pemeriksa (auditor)". Jurnal manajemen & bisnis vol 13 No.01 April 2013 ISSN 1693-7619.
- Fidelius. "Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota manado". Jurnal EMBA Vol.1 No. 4 Desember 2013, Hal. 2088-2096.
- Hendriyardi, Sigit. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Diponegoro, 2013.
- Isnadiva, S. M. dan Haryanto. (2021). "Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018". Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 9 (1), 83–100.
- Khairudin dan Rina Erlanda.2016. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Peemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7, No. 2. Hal. 137-154.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). "The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia". Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 25(1), 54–64.
- KPK. "Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: KPK. 2006.
- Mahaputra, I Putu Upahayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. "Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah".E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 8.2: 230-244.
- Nugroho, Fajar. "Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening". Skripsi. Undip. 2012
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Pope, J. 2008. " Strategi Memberantas Korupsi". Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Rini, R., & Damiati, L. 2017. "Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia". Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 4 (1), 73–90.
- Ronald, A dan Sarmiyatiningsih, D. "Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo". Efektif jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1 No.1, Juni 2010, 31-42.

- Setiawan, Wahyu. “*Pengaruh Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi Pemerintah daerah di Indonesia*”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2012.
- Sitorus, Cyndi Putri Permata Sari dan Sri Rahayu. “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi*”. Skripsi Universitas Telkom. 2018.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. “*Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan*”. Simposium Nasional Akuntansi 12. 2009.
- Tehupuring, R. (2018). “*Unqualified Opinion and Level of Corruption: The Triangulation Approach*”. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 1–20.
- Triwibowo, S. (2019). “*Pengelolaan Keuangan Publik dan Korupsi di Indonesia: Kointegrasi Panel dan Analisis Kausalitas*”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 34(3), 267–279.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiranto, Tatag. “*Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*”. 2009.
- Wahyuni, Nanik. “*Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*”. Jurnal El-Muhasaba Vol. 1 No. 1;01-2010. UIN Maliki. Malang. 2007.
- Wakhyudi, dan Laila Firda Tarunasari. “*Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*” . Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 1 No. 2, 2013 pg. 139-150. STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852.
- Wulandari, Rika. “*Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2015.